

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
(UAPPA-W)
SEMESTER I TA 2026

Kode dan Nama UAKPA : (682249) Pengadilan Agama Mentok
 Kode dan Nama UAPPAW : (3000) Bangka Belitung
 Kode dan Nama Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (N) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. Face LRA, Neraca, LO, dan LPE	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/ MonSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3. Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama

PENGECEKAN PADA MonSAKTI			
To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		✓	Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3. Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah		✓	Tidak
6. Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi <i>Approve</i> per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12. Terdapat Persediaan Belum <i>Approve</i> per tanggal pelaporan		✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		✓	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		✓	Tidak
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA?		✓	Tidak
i. Pagu/DIPA		✓	Tidak
ii. Estimasi PNB		✓	Tidak
iii. Belanja		✓	Tidak
iv. Pengembalian Belanja		✓	Tidak
v. Pendapatan		✓	Tidak
vi. Pengembalian Pendapatan		✓	Tidak
vii. Kas BLU		✓	Tidak
viii. Kas Di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
ix. Kas Hibah		✓	Tidak
x. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak

Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
Daftar MonSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		✓	Tidak
3. Adakah Neraca Tidak <i>Balance</i> ?		✓	Tidak
4. Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5. Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6. Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Tidak
2. Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5. Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6. Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7. Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8. Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak
9. Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak

10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11. Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12. Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13. Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2. Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	✓		Ya
1. Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Tidak
2. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Tidak
3. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	✓		Ya
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Tidak
5. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau		✓	Tidak

maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)?			
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Tidak
1. Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Tidak
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	✓		Ya
2. Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	✓		Ya
3. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		✓	Tidak
2. Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Tidak
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		✓	Tidak
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Tidak
Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya

Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah.		✓	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA			
Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2. Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4. Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6. Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7. Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya

8. Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2. Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		✓	Tidak
3. Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4. Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5. Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya
6. Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya
7. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1. "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2. Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya
3. Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST		✓	Tidak
2. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)		✓	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2. Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3. Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak
4. Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5. Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka		✓	Tidak

Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Tidak Ada
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Tidak Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Tidak Ada
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Tidak Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		✓	Tidak Ada
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Tidak Ada
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	✓		Ya Ada
- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya Ada
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	✓		Ya Ada
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya Ada
5. Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		✓	Tidak Ada
Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Tidak Ada
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		✓	Tidak Ada
Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak Ada
2. Apakah ada Beban Bansos?		✓	Tidak Ada
Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak Ada
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	✓		Ya
2. Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Tidak
- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak

TELAAH LK BLU			
LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		✓	Tidak Ada
2. Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		✓	Tidak Ada
3. Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		✓	Tidak Ada
4. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?		✓	Tidak Ada
5. Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		✓	Tidak Ada
6. Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		✓	Tidak Ada
LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?		✓	Tidak Ada
2. Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		✓	Tidak Ada
3. Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		✓	Tidak Ada
4. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		✓	Tidak Ada
5. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		✓	Tidak Ada
6. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		✓	Tidak Ada
7. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		✓	Tidak Ada
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN			
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA , serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MonSAKTI "			
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL  DENNERI, S.E. NIP. 19770317 201101 1 001		Mentok, 20 Juli 2026 Penelaah  MUHAMAD DENI SAPUTRA NIP. 199412052020121005	

PENGADILAN AGAMA MENTOK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Dusun IV Daya Baru, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok

Kabupaten Bangka Barat - Bangka Belitung 33311

Telp. (0716) 21294 Fax. (0716) 21309

e-mail : pa.mentok@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTASI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA MENTOK

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Komplek Perkantoran Pemkot Bangka Barat, Dusun IV Daya Baru, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok

Telp. (0716) 21294 Fax. (0716) 21309

Kabupaten Bangka Barat - Bangka Belitung 33311

e-mail : pa.mentok@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Mentok adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mentok mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Mentok. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mentok, 20 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris



DENNER, SE
NP. 197703192011011001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
A1. Dasar Hukum	12
A2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mentok	13
A3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A4. Basis Akuntansi	20
A5. Dasar Pengukuran	20
A6. Kebijakan Akuntansi	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	27
B1. Pendapatan Negara dan Hibah	27
B2. Belanja	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C1. Aset Lancar	32
C2. Aset Tetap	34
C5. Kewajiban Jangka Pendek	38
C6. Ekuitas	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	39

D2	Beban Pegawai	39
D3	Beban Persediaan	40
D4	Beban Barang dan Jasa	41
D5	Beban Pemeliharaan	42
D6	Beban Perjalanan Dinas	42
D7	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	43
D8	Beban Bantuan Sosial	43
D9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
D10	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	44
D11	Beban Lain-lain	45
D12	Kegiatan Non Operasional	45
D13	Pos Luar Biasa	46
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Buitas	46
E1	Buitas Awal	46
E2	Surplus (defisit) LO	46
E3	Koreksi Nilai Persediaan	46
E4	Koreksi Aset Tetap	47
E5	Koreksi atas Beban	47
E6	Koreksi atas Pendapatan	47
E7	Buitas Akhir	48
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	48
F1	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	48
F2	Pengungkapan Lain-lain	48

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat	26
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNEP per 30 Juni TA 2026	28
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNEP per 30 Juni TA 2026 30 Juni dan 2025	28
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026	28
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026	29
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025	29
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025	30
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025	31
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025	32
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	33
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	33
Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025	34
Tabel 16 Rincian Aset Tetap	34
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	35
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap <i>(dalam satuan Rupiah)</i>	37
Tabel 19 Rincian Aset tak Berwujud <i>(dalam satuan Rupiah)</i>	38
Tabel 20 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025	38

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Mentok

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Dusun IV Daya Baru, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok Kabupaten

Bangka Barat - Bangka Belitung 33371

Telp. (0716) 21294 Fax. (0716) 21309 e-mail: pa.mentok@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mentok telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muntok, 20 Juli 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretaris



DENER, SE

NP. 197783172013011001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (U) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK4L) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mentok Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 148,000 atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 4,115,962,587,- atau mencapai 59,07% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6,968,166,000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026			30 Juni 2025
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	148,000	100	0
Belanja Negara	4,968,166,000	4,115,962,587	59,07	1,425,863,984

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4,269,207,671,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 29,439,500,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 4,233,268,171 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 6,500,000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 390,683,354,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 390,683,354,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Buitas Dana disajikan sebesar Rp. 3,878,524,317.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA.2026 dan 30 Juni TA.2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	Per 30 Juni 2026	Per 30 Juni 2025	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	29,439,500	19,694,300	9,745,200	49.48
Aset Tetap	4,233,268,171	4,303,625,798	(70,357,587)	(1.63)
Aset Lainnya	6,500,000	6,500,000	0	0
Jumlah Aset	4,269,207,671	4,329,820,098	(60,612,387)	(1.40)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	390,683,354	555,788,898	(165,105,544)	(29.71)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	390,683,354	555,788,898	(165,105,544)	(29.71)
Buitas				
Buitas Dana	3,878,524,317	3,774,031,160	104,493,157	2.77
Jumlah Buitas Dana	3,878,524,317	3,774,031,160	104,493,157	2.77
Jumlah Kewajiban dan Buitas Dana	4,269,207,671	4,329,820,098	(60,612,387)	(1.40)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LQ, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LQ yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LQ untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 148,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4,011,469,430,- sehingga terdapat (defisit) dari Kegiatan Operasional nilai Rp. (4,011,321,430) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0, dan defisit sebesar Rp. (4,011,321,430) sehingga entitas mengalami (defisit) -LQ sebesar Rp. (4,011,321,430).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan nilai ekuitas entitas selama periode pelaporan sebagai akibat dari aktivitas operasional maupun transaksi lainnya, serta memberikan gambaran perbandingan antara tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas entitas pada tanggal 1 Januari 2026 tercatat sebesar Rp3.774.031.160. Selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2026, terdapat defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp(4.011.321.430). Selain itu, tidak terdapat koreksi yang memengaruhi ekuitas (Rp0,00) pada periode pelaporan. Selanjutnya, Transaksi Antar Entitas memberikan penambahan sebesar Rp4.115.814.587, sehingga secara keseluruhan terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp104.493.157. Dengan demikian, ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 menjadi sebesar Rp3.878.524.317.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MENTOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni 2026			30 Juni 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	Pendapatan Negara dan Hibah	B1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B1.1	0	148,000	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	148,000	0,00	0,00
B	Belanja Negara	B2				
1.	Belanja Pegawai	B2.1	5,674,382,000	3,551,259,676	63	1,165,429,125
2.	Belanja Barang	B2.2	1,254,784,000	527,702,911	42	460,434,859
3.	Belanja Modal	B2.3	37,000,000	37,000,000	100	0,00
	Jumlah Belanja Negara		6,966,166,000	4,115,962,587	59,07	1,625,863,984

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. *NERACA PERBANDINGAN*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MENTOK
NERACA
PER 30 JUN 2026 DAN 30 JUN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		30 Juni 2026	30 Juni 2025
ASET				
Aset Lancar	C1			
Kas dan Bank				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C1. 1		24,000,000	0
Persediaan	C1. 2		5,439,500	8,115,150
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C1. 3		0	11,579,150
Jumlah Aset Lancar			29,439,500	19,694,300
Aset Tetap	C2			
Tanah	C2. 1		459,726,000	459,726,000
Peralatan dan Mesin	C2. 2		2,378,996,999	2,400,372,007
Gedung dan Bangunan	C2. 3		4,587,558,000	4,587,558,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C2. 4		0	0
Aset Tetap Lainnya	C2. 5		3,741,109	3,741,109
Konstruksi dalam Pengerjaan	C2. 6		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C2. 7		(3,196,753,937)	(3,340,771,358)
Jumlah Aset Tetap			4,233,268,171	4,303,625,758
Aset tak Berwujud	C4. 1		6,500,000	6,500,000
Jumlah Aset			4,269,207,671	4,329,820,058
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	C5			
Uang Muka dari MPN	C5. 1		24,000,000	0
Uang Kepada Pihak Ketiga	C5. 2		366,150,864	555,788,898
Uang yang belum ditagihkan	C5. 3		532,510	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			390,683,354	555,788,898
Jumlah Kewajiban			390,683,354	555,788,898
BUTAS				
Buitas	C6		3,878,524,317	3,774,031,160
Jumlah Buitas			3,878,524,317	3,774,031,160
Jumlah Kewajiban dan Buitas			4,269,207,671	4,329,820,058

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MENTOK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUN 2026 DAN 30 JUN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kegiatan Operasional				
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D1		0	0
Jumlah Pendapatan			148,000	0
Beban				
Beban Pegawai	D1	2	3,373,396,671	1,317,843,110
Beban Persediaan	D1	3	14,656,500	14,744,300
Beban Barang dan Jasa	D1	4	371,703,152	333,776,003
Beban Pemeliharaan	D1	5	117,303,116	133,228,625
Beban Perjalanan Dinas	D1	6	27,052,404	18,188,034
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D1	7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D1	8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D1	9	107,357,587	107,166,337
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D1	10	0	0
Beban Lain-lain	D1	11	0	0
Jumlah Beban			4,011,449,430	1,924,946,409
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			(4,011,321,430)	(1,924,946,409)
Kegiatan Non Operasional	D1	12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0
Defisit Selisih Kurs			0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional			0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			(4,011,321,430)	(1,924,946,409)
Pos Luar Biasa	D1	13		
Surplus (Defisit) Laporan Operasional			(4,011,321,430)	(1,924,946,409)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MENTOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUN 2026 DAN 30 JUN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E 1	3,774,031,160	4,513,666,656
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E 2	(4,011,321,430)	(1,924,946,409)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E 3	0	0
Penyusunan Nilai Aset	E 4	0	0
Koreksi atas reklasifikasi	E 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E 6		
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E 7	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E 8	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E 9	0	0
Koreksi Lain-lain	E 10	0	0
Transaksi Antar Entitas	E 11	4,115,814,587	1,625,863,984
Kenaikan/Perurunan Ekuitas	E 12	104,493,157	(299,082,425)
Ekuitas Akhir		3,878,524,317	4,214,584,231

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SBK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mentok

Visi Pengadilan Agama Mentok adalah

" TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MENTOK YANG AGUNG "

Misi Pengadilan Agama Mentok adalah

1. Menciptakan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan dan antar aparat Peradilan Agama Mentok
2. Menjaga harkat dan martabat peradilan agama, baik di lingkungan instansi Pengadilan Agama Mentok maupun di lingkungan kehidupan masyarakat.
3. Menjalankan administrasi teknis dan non teknis yang profesional dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Meningkatkan wawasan dan skill aparatur Pengadilan Agama Mentok
5. Menjaga akhlakul karimah bagi setiap aparat peradilan dalam menjalankan tugas
6. Mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kerja dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Mentok
7. Meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Mentok melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Kebijakan Dan Strategi Bidang Teknis Yuridis

Sebagaimana telah disebutkan di atas pada kebijakan dan kepengrimpinan di Pengadilan Agama Mentok, maka titik fokusnya pada pengembangan kebijakan sumber daya manusia , yaitu hakim dengan mengembangkan pola dengan beberapa model penilaian kinerja hakim yaitu:

Model 1

Penilaian kinerja tahunan dengan penilaian kinerja hanya akan merupakan review tahunan (once a year review) yang lebih bermakna ritual bagi organisasi maupun personil.

Model 2

Penilaian kinerja (performance management) yang didesain sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan seluruh siklus organisasi. Model ini muncul pada tahun 80-an ketika organisasi cenderung berorientasi kinerja (era management by objective), fokus dan model ini adalah penetapan out put, serta kesinambungan antara objektif pekerjaan (job objective) dengan objektif dan strategi organisasi (strategic

objective).

Model 3

Penilaian kinerja yang memasukkan kompetensi. Model ini biasa disebut mixed model karena di dalam prosesnya, individu disandarkan akan target yang harus dicapai selain bagaimana cara ia mencapai target tersebut. Proses pencapaian ini diterjemahkan ke dalam kompetensi melalui bahasa perilaku. Dalam penyusunan model ini perlu ditunjukkan visi yang jelas, apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Hal ini sangat efektif bagi upaya perbaikan kinerja.

Model 4

Penilaian kinerja berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan proses kunci lainnya (key process) dalam organisasi. Pengelolaan kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan organisasi, sehingga tercipta keselarasan antara sasaran organisasi, sasaran tim dan individu. Melalui model ini, diharapkan setiap orang akan memiliki tujuan kerja dan organisasi yang sama, core values organisasi berada di dalam proses pengelolaan kinerja sebagai perangkat perilaku esensial bagi seluruh personil.

Model 5

Penilaian kinerja berbasis kompetensi sebagai proses kunci untuk menciptakan dan memperkuat rencana perubahan budaya (planned culture change) melalui model kompetensi, yang mana ditetapkan budaya baru (desire behaviors) ke dalam proses pengelolaan kinerja. Cara ini memberikan dorongan yang baik bagi organisasi untuk menjalankan dan memperkuat perubahan perilaku (behavior). Namun, kondisi ini harus berjalan selaras dengan proses sumber daya manusia lainnya dalam organisasi, seperti sistem reward, pengembangan dan makna bekerja.

Agar sistem penilaian kinerja hakim memberikan manfaat jangka panjang, yakni untuk pengembangan karir hakim, maka penilaian difokuskan pada hasil kerja/kinerja yang telah dicapai hakim (performance) dan kompetensi hakim (competence). Kedua komponen ini merupakan parameter untuk melihat kinerja hakim dan kemampuan yang dibutuhkan sehingga dari penilaian yang dilakukan terhadap kedua komponen ini akan diketahui kesenjangan (gap) kinerja maupun kompetensi yang dimiliki dengan yang ditampilkan.

Secara garis besar, tugas pokok hakim adalah memeriksa dan memutus perkara. Untuk dapat melakukan tugas pokok tersebut, maka setidaknya pendapat beberapa aspek utama yang diperlukan oleh seorang hakim yaitu:

- a. Penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum
- b. Penguasaan hukum materil dan formil
- c. Penguasaan teknis persidangan termasuk di dalamnya teknis pembuktian, manajemen persidangan dan lain-lain.

Selain tiga aspek pokok tersebut, aspek-aspek lain yang diperlukan sebagai aspek penunjang tugas pokok tersebut, yaitu:

a) Tanggung jawab

Yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kesanggupan hakim menyelesaikan tugas yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya serta berani memikul segala resiko yang muncul atau dapat muncul atas keputusan atau tindakan yang dilakukannya. Dalam menjalankan tugas pokoknya, hakim selalu dihadapkan pada persoalan yang menentukan nasib orang lain yang terkadang dapat menentukan hidup matinya orang lain. Untuk itu, adanya rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri seorang hakim sangatlah dibutuhkan.

b) Kepemimpinan

Dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu memeriksa dan memutus perkara, hakim ditempatkan dalam posisi sebagai pemimpin sidang yang diharapkan dapat mengarahkan proses persidangan menjadi lebih terarah serta adil. Untuk itu, maka dalam diri setiap hakim diperlukan adanya aspek kepemimpinan yang baik.

c) Kerja sama

Aspek kerja sama merupakan aspek yang sangat penting bagi hakim dalam menjalankan tugas pokoknya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugas pokoknya, umumnya hakim akan bekerja bersama-sama dalam membentuk majelis hakim. Tanpa adanya kerja sama yang baik di antara anggota majelis, maka tentunya akan sulit menghasilkan putusan yang baik.

Selain mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokoknya, hakim juga mengemban tugas-tugas lain. Tugas-tugas tersebut berupa tugas-tugas administratif yang merupakan bagian dari tugas pokok serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pengadilan. Dalam menyusun instrumen evaluasi kualitas dan kinerja hakim, maka tugas-tugas tersebut perlu untuk dijadikan salah satu aspek penilaian. Di antara kesibukan hakim dalam menjalankan pekerjaannya, seorang hakim terkadang masih menyempatkan diri untuk melakukan kegiatan yang sifatnya prestatif. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi karena dengan kegiatan prestatif hakim akan bermanfaat untuk kemajuan di bidang hukum maupun dalam meningkatkan citra lembaga peradilan. Bentuk apresiasi yang bisa diberikan pada kegiatan prestatif hakim adalah dengan memperhitungkan prestasi yang dicapai hakim tersebut dalam penilaian kinerja dan kualitas hakim.

Tentunya tidak semua prestasi yang dihasilkan seorang hakim berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok hakim. Untuk kepentingan kualitas dan kinerja hakim, maka prestasi yang dapat dijadikan bagian dari penilaian adalah prestasi yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung, yang dapat menunjang tugas pokok hakim. Sejalan ini jenis-jenis prestasi tersebut antara lain adalah:

- a. Prestasi di bidang pengembangan ilmu hukum
- b. Keberhasilan melakukan upaya perdamaian.

- c. Penghargaan yang diberikan oleh lembaga negara maupun lembaga-lembaga lainnya.

Dari aspek-aspek di atas, untuk kepentingan penyusunan instrumen evaluasi kualitas dan kinerja hakim maka aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori atau dimensi, yaitu:

- a. Penanganan perkara, yang terdiri dari:
- Kemampuan teknis yudisial.
 - Upaya perdamaian/keberhasilan hakim dalam melaksanakan perdamaian di luar sidang (mediasi).
 - Kerja sama Kepemimpinan.
 - Tanggung jawab.
- b. Administrasi perkara, yang terdiri dari:
- Kecepatan waktu penyelesaian berita acara persidangan.
 - Kecepatan waktu penyelesaian minutası perkara. Kecepatan penetapan hari sidang.
 - Ketepatan waktu penyelesaian perkara.
- c. Kegiatan prestatif hakim yang terdiri dari:
- Prestasi ilmiah di bidang hukum.
 - Kepercayaan menjalankan tugas di luar tugas pokok.

Sebagaimana disebut di atas hanya bersifat penilaian subjektif, maka harus diarahkan pada aspek lainnya, yaitu pengembangan dan kiat-kiat yang sangat menunjang kesuksesan pelaksanaan teknis yudis, antara lain:

- a. Peningkatan sistem persidangan yang terjadwal dan secara konsisten mampu melaksanakan pola bindalmin Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- b. Mampu mengimplementasikan sistem teknologi informasi.
- c. Mampu mengadaptasikan proses digitalisasi kearsipan dan perpustakaan.
- d. Kemampuan melaksanakan pengawasan dan pembinaan materi teknis dan non teknis.

Dengan demikian status hakim sangat menentukan program dan strategi kebijakan peradilan karena menyangkut secara langsung penegakan hukum di samping juga oleh pejabat terkait yaitu panitera, panitera pengganti, juru sita atau juru sita pengganti. Untuk itu, dalam memperoleh status hakim tersebut (program rekrutmen) lebih ketat syarat-syaratnya dibanding persyaratan jabatan di luar hakim.

Status mulia dan terhormat tersebut, haruslah lebih menguasai bidang dan tugasnya, lebih profesional dengan tetap mempedomani dan menghayati kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Masih sangat relevan juga dari kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut di atas, di Pengadilan Agama Mentok juga mengenal 10 (sepuluh) pokok dasar perilaku Islam yang terkenal dengan sebutan Risalah Al Qodha.

B Pembinaan Sumber Daya Manusia Peradilan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya manusia peradilan antara lain adalah distribusi pegawai Pengadilan Agama saat ini masih kurang sesuai dengan distribusi tugas, fungsi dan kewenangan; komposisi pegawai yang ada masih belum ideal untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi; pengadaan pegawai yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang realistis sesuai volume kerja; penempatan pegawai dalam jabatan yang masih belum didasarkan pada pola karir; sistem penilaian kinerja yang kurang objektif; kenaikan pangkat belum didasarkan pada prestasi kerja; diklat sumber daya manusia yang ada belum efektif dalam meningkatkan kompetensi SDM dan data base pegawai yang belum informatif.

Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh sumber daya manusia jauh lebih kompleks dari yang dikemukakan di atas. Di antaranya adalah tidak seluruh pegawai memiliki uraian tugas yang menjadi pegangan dalam melaksanakan pekerjaannya. Akibatnya, banyak pegawai yang tidak mengetahui apa pekerjaannya yang sesungguhnya. Seorang calon pegawai diterima bekerja di Pengadilan Agama tidak langsung memiliki uraian tugas sehingga calon pegawai tersebut cenderung membantu-bantu pekerjaan yang juga ditangani oleh pegawai yang lain.

Dengan demikian, ruang lingkup dan volume pekerjaan, beban dan tanggung jawab serta kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan secara orang per orang menjadi kurang jelas. Akibat dari tidak adanya uraian tugas tersebut, sistem penyelesaian pekerjaan pegawai cenderung bersifat keroyokan. Sistem keroyokan ini lebih sering menguntungkan pegawai yang tidak memiliki kompetensi dan merugikan mereka yang berkinerja tinggi karena volume pekerjaan yang ditangani oleh pegawai yang kinerjanya lebih bagus (good performers) akan lebih banyak dari mereka yang bad performers, sementara sistem penggajian belum berdasarkan pada sistem performance related pay.

Sistem manajemen sumber daya manusia memiliki sejumlah kelemahan mendasar antara lain:

- a. Lebih menonjolkan sisi administratif dari pada sisi manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia modern.
- b. Lebih bersifat sentralistik sehingga kurang mengakomodasikan nilai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Tidak terdapat prinsip check and balance dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian sehingga mendorong terjadinya duplikasi, akhirnya menghambat prinsip akuntabilitas.
- d. Kurang didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang memadai sehingga berpengaruh negatif pada proses pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian.
 1. Tidak mampu mengontrol dan mengaplikasikan prinsip sistem merit secara tegas.
 2. Tidak memberi ruang atau dasar hukum bagi pengangkatan pejabat non karir.

3. Tidak mengkomodasikan dengan baik klasifikasi jabatan dan standar kompetensi sehingga berpengaruh negatif terhadap pencapaian kinerja organisasi dan individu.

Untuk menjawab persoalan kepegawaian di atas, satu-satunya langkah strategis yang penting dilakukan adalah melalui apa yang disebut dengan civil service reform. Civil service reform ini diarahkan untuk menyempurnakan keseluruhan sistem pembinaan pegawai, mulai dari perencanaan kebutuhan, penetapan, pemindahan, promosi, mutasi, pendidikan dan latihan, kesejahteraan, pemberhentian, penetapan pensiun dan tunjangan hari tua. Masing-masing subsistem di atas harus terkait secara sistematis, rasional dan konsisten. Ruang lingkup reformasi ini difokuskan pada tiga dimensi pokok sesuai dengan perspektif di atas, yaitu peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, terdapat tiga kegiatan pokok yang harus disempurnakan, yaitu satu sama lain saling berhubungan.

Civil service reform perlu menjadi agenda yang didukung kesiapan seluruh komponen birokrasi pengadilan dan masyarakat serta dengan political will yang kuat dari pimpinan Pengadilan Agama Mentok. Political will itu sendiri tampaknya sudah memadai untuk memulai langkah-langkah konkret. Dalam konteks satu aspek, civil service reform diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan peradilan melalui penataan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Dalam kondisi penancangan awal renstra ini, Pengadilan Agama Mentok mengatasi permasalahan sumber daya manusia dengan pola apa adanya karena personil yang terbatas dengan banyaknya jabatan rangkap antara fungsional dan struktural, itupun masih ada beberapa jabatan yang kosong, maka dengan semangat pelatihan terus menerus di tempat kerja, walaupun akan memunculkan permasalahan baru bagi pemangku pimpinan harus ekstra kerja keras menambah pengetahuan teknis yuridis maupun non yuridis dengan metode baru.

C. Strategi Efisiensi Anggaran Dan Efisiensi Kerja

Kebijakan kerja nasional dan akuntabilitas fiskal merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan perombakan sistem sosial dan hukum yang dilakukan di era reformasi dengan menggantikan sistem politik otoristik dengan sistem demokratis.

Sistem politik demokrasi itu memberikan jaminan kebebasan berserikat dan bersuara termasuk reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan, sekaligus menuntut pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas fiskal mengurangi sumber konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga dapat dipelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh atas sistem keuangan negara yang dipergunakan pada masa pemerintahan sekarang ini.

Pertama adalah dengan mengintegrasikan anggaran negara, meniadakan perbedaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan, sementara itu, peranan anggaran non budgeter semakin dikurangi, perubahan teknis administrasi pertanggungjawaban keuangan negara secara mendasar, termasuk jenis format laporan keuangan membertukarkan sistem pembukuan berpasangan, menggunakan sistem akuntansi terpadu yang dikomputerisasi serta menerapkan desentralisasi serta pelaksanaan akuntansi secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di pusat ataupun di daerah. Karena ada beberapa perubahan sistem akuntansi keuangan serta format dan aplikasi sebagaimana disebut di atas, maka perlu kiat-kiat terhadap efisiensi anggaran yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis kinerja keuangan terhadap efektifitas dan efisiensi peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK/09 dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dengan cara antara lain:
 - Meningkatkan kinerja kepatuhan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dan penggunaan keuangan yang dimuat di dalam rencana kerja, serta pemahaman waktu-waktu pencairan yang telah ditentukan.
 - Pengelolaan dan pelaporan keuangan negara harus tepat waktu, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Mengelola sumber daya manusia.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan negara, diperlukan sumber daya manusia, minimal memiliki kompetensi atau latar belakang akuntansi. Di Pengadilan Agama Mentok sangat terbatas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang akuntansi, oleh sebab itu pengelola keuangan di satuan kerja wajib diikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat keuangan, baik yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan, sehingga diharapkan aparat pengelola keuangan di satuan kerja Pengadilan Agama Mentok bisa melaksanakan dan mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Intensitas pengawasan internal oleh para hakim pengawas bidang yang mumpuni dan bertanggung jawab serta mampu memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan mampu menyusun temuan-temuan dan upaya tindak lanjutnya sebagai bahan evaluasi kerja berikutnya. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan akan mempengaruhi terhadap hasil kerja maksimal dengan ciri cepat, tepat dan berdaya guna dengan berprinsip tertib persidangan, tertib perkantoran, tertib jam kerja dan tertib rumah tangga.

A3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluarannya/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Mentok adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan adalah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara

yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

o Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

o Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Buitas

Buitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

(8) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Ususan Piutang Negara/DJNN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KCP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/MMK/06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik/modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode per 30 Juni Tahun 2026 berjalan, Kantor Pengadilan Agama Mentok Telah Melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 8 (Delapan) Kali yaitu:

No	Revisi	DS DPA	Tanggal Sah Revisi	Ket
1	Rev 1	DS: 8950-2782-1552-7827	24 Desember 2025	Revisi Pusat
2	Rev 2	DS: 8950-2782-1552-7827	05 Januari 2026	Revisi KPA
3	Rev 3	DS: 8950-2782-1552-7827	20 Januari 2026	Revisi Pergeseran Pagu
4	Rev 4	DS: 8950-2782-1552-7827	06 Februari 2026	Revisi POK dan Hal III DIPA
5	Rev 5	DS: 1010-9589-8602-5900	9 April 26	Revisi Pusat Penambahan Pagu
6	Rev 6	DS: 1010-9589-8602-5900	27 April 26	Revisi POK dan Hal III DIPA
7	Rev 7	DS: 9615-5110-4682-4882	17 Juni 2026	Revisi Pusat
8	Rev 8	DS: 9615-5110-4682-4882	13 Juli 2026	Revisi Hal III DIPA

Tabel 6 Rincian Anggaran Awal dan Setelah Revisi per 30 Juni 2026
(dalam satu Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	0	0
BELANJA		
Belanja Pegawai	2,604,948,000	5,674,382,000
Belanja Barang	1,281,217,000	1,256,784,000
Belanja Modal	37,000,000	37,000,000
JUMLAH BELANJA	3,923,165,000	6,968,166,000

B1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah: Rp
148,000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 148,000,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Mentok adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNEP per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Nb	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAML	0	0	0,00
3.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	148,000	0
	Total Pendapatan	0	148,000	0,00

Perbandingan realisasi PNEPTA 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNEP per 30 Juni TA 2026 30 Juni dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Nb	Uraian	31 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAML	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Pensakot/Uang Muka Guji	0	0	0	0
4.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	148,000	0	148,000	0
	Total Pendapatan	148,000	0	0	0

B2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
4,115,962,587.

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Mentok per 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp. 4,115,962,587. setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 59.07% dari anggaran senilai Rp. 6,968,166,000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

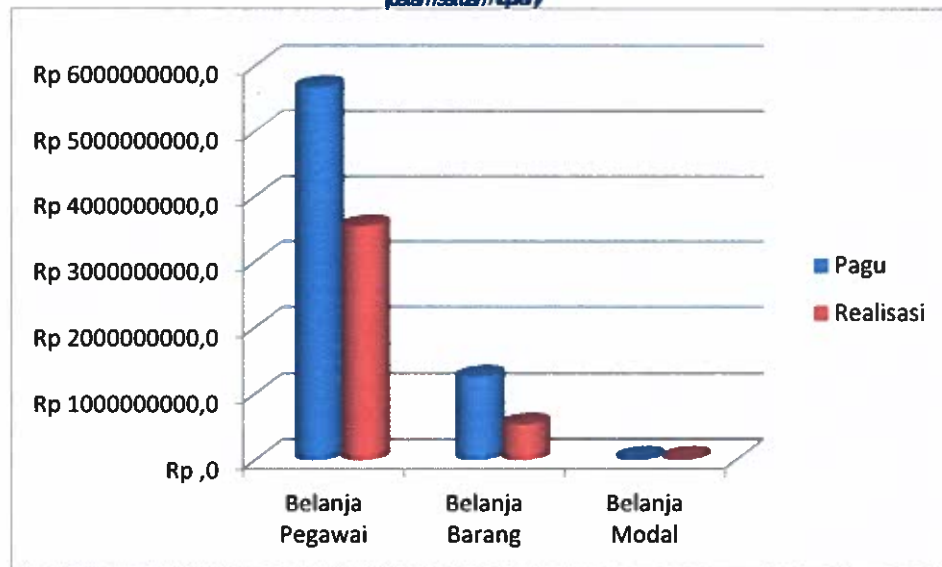
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5,614,382,000	3,551,259,856	62.58
Belanja Barang	1,256,784,000	527,702,911	41.99
Belanja Modal	37,000,000	37,000,000	100

Total Belanja Bruto	4,968,164,000	4,115,962,767	59.07
Pengembalian Belanja	0	180	0
Total Belanja Netto	4,968,164,000	4,115,962,587	59.07

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Klasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 30 Juni 2025

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2.490.098.603 atau sebesar 60,50 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan realisasi belanja Pegawai Gaji Hakim pada tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada waktu yang sama di tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3,551,259,676	1,165,429,125	2,385,830,451	67,18
Belanja Barang	527,702,911	460,434,859	67,268,052	12,75
Belanja Modal	37,000,000	0	37,000,000	100,00
Total Belanja	4,115,962,587	1,625,863,984	2,490,098,603	60,50

B21. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
3.551.259,676

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Mentok per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 3,551,259,676,- dan Rp. 1,165,429,125,-

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2026 Semester I mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2,385,830,551,- atau 67,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni Tahun 2025. Hal ini disebabkan antara lain: Pada Tahun 2026 ada Kenaikan Belanja Pegawai berupa Kenaikan Gaji Hakim di tahun 2026

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	520,758,620	484,101,900	106,656,720	28,74
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,996	7,123	2,873	28,74
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39,430,978	36,422,226	3,008,752	7,63
Belanja Tunj. Anak PNS	14,239,088	13,229,548	1,009,540	7,09
Belanja Tunj. Struktural PNS	16,080,000	15,590,000	490,000	3,05
Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,400,000	77,100,000	(60,700,000)	(370,12)
Belanja Tunj. FfH PNS	2,489,806	10,729,081	(8,239,205)	(330,91)
Belanja Tunj. Baras PNS	34,761,600	29,764,620	4,996,980	14,37
Belanja Uang Makan PNS	57,629,000	42,482,000	15,137,000	26,27
Belanja Tunjangan Umum PNS	10,240,000	4,055,000	6,185,000	60,40
Belanja Tunjangan Kematangan Hakim	33,750,000	24,300,000	9,450,000	28,00
Belanja Tunj. FfH Pejabat Negara	551,544,646	81,182,838	470,361,808	85,28
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,115,400,000	417,200,000	1,698,200,000	80,28
Belanja Gaji Pokok PPPK	106,113,175			
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,187			
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,375,240			
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,343,570			
Belanja Tunjangan Baras PPPK	5,250,460			
Belanja Uang Makan PPPK	14,824,000			

Belanja Tunjangan Umum/PPK	4,977,300			
Total Belanja Bruto	3,551,259,856	1,166,174,266	2,385,085,590	67,16
Pengembalian Belanja	180	745,161	(744,961)	(613,867,22)
Total Belanja Netto	3,551,259,676	1,165,429,125	2,385,830,551	67,18

B2.2 Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang: Rp.
527,702,91

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Mentok per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 527,702,911- dan Rp. 460,434,859.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni TA 2026 tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.268.052 atau 14,61 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya realisasi Belanja Keperluan Perkantoran (521111) untuk belanja jasa tenaga alih daya (outsourcing) sebanyak 5 orang selama 12 bulan, yang belum terdapat pada tahun anggaran sebelumnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan realisasi Belanja Barang pada Semester I TA 2026 dibandingkan dengan Semester I TA 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	252,536,495	241,869,800	10,666,695	4,41
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37,000	0	37.000	
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	23,000,000	(2.950.000)	(12,83)
Belanja Barang Operasional Lainnya	1,710,000	1,490,000	220.000	14,77
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,407,000	21,625,800	(1.218.800)	(5,64)
Belanja Bahan	300,000	300,000	0	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompletabel	1,440,000	700,000	740.000	105,71
Belanja Langganan Listrik	55,133,472		55.133.472	
Belanja Langganan Telepon	401,572	407,240	(5.668)	(1,39)
Belanja Langganan Air	3,977,814	3,395,360	582.454	17,15

Belanja Sewa	36,034,098	26,460,000	9.574.098	36,18
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80,152,191	86,143,000	(5.990.809)	(6,95)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,470,865	36,855,625	(8.384.760)	(22,75)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,052,404	18,188,034	8.864.370	48,74
Total Belanja Brutto	527,702,911	460,434,859	67.268.052	14,61
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Total Belanja Netto	527,702,911	460,434,859	67.268.052	14,61

B2.3 Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
Rp.
37,000,000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Mentok per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 37,000,000,- dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni TA 2026 mengalami Kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2025. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Mentok tidak mendapatkan Alokasi Belanja Modal.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37,000,000	0	37,000,000	100,00
Total Belanja Brutto	37,000,000	0	37,000,000	100,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	37,000,000	0	37,000,000	100,00

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp.
29,439,500

C1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 29,439,500,- dan Rp. 19,694,300,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk

dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Mentok per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	30 Juni TA.2026	30 Juni TA.2025
	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0
	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	11,579,150
	Persediaan	5,439,500	8,115,150
	Total Aset Lancar	29,439,500	19,694,300

C1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
24,000,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 24,000,000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis	30 Juni TA.2026	30 Juni TA.2025
1	Tunai	24,000,000	0
2	Bank	0	0
3	Kuitansi SPMUP	0	0
4	Selisih Kas	0	
	Jumlah	24,000,000	0

C1.2 Persediaan

Persediaan Rp
5,439,500

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 5,439,500 dan Rp. 2,399,500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	Barang Konsumsi	3,696,500	1,981,000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1,743,000	418,500
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Legas	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	5,439,500	2,399,500

C2. Aset Tetap

Aset Tetap: Rp
4,233,268,171

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 tersaji sebesar Rp. 4,233,268,171,- dan Rp. 4,303,625,758,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan
1	Tanah	459,726,000	459,726,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,378,996,999	2,600,372,007	(221,375,008)
3	Gedung dan Bangunan	4,587,558,000	4,587,558,000	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0
5	Aset Tetap Lainnya	3,741,109	3,741,109	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0	0

Jumlah	7.430.022,108	7.651.397,116	(221.375.008)
Akumulasi Penyusutan	(3.196.753,937)	(3.347.771,358)	151.017,421
Nilai Buku Aset Tetap	4.233.268,171	4.303.625,758	(70.357.587)

C21. Tanah

Tanah Rp.
459.726.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 459,726,000 dan Rp. 459,726,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No	MB	Luas (m ²)	No Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	2.512	183	Pemerintah RI Cq MAR	Operasional	459.726.000
Jumlah						459.726.000

C22. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin:
Rp. 2.378.996.999

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,378,996,999 dan Rp. 2,578,942,007.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	2.378.996.999
Mutasi Tambah	0
Pembelian/Transfer Masuk	28.470.865
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	2.400.372.007
Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2026	(2.448.808.565)
Nilai Buku 30 Juni 2026	151.563.442

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 700.000,- Hibah Masuk Rp. 10.000.000 dan Transfer Masuk Rp. 11.430.000 Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
4.587.558.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.587,558,000 dan Rp. 4.587,558,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	4.587.558.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	4.587.558.000
Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2026	(898.962.793)
Nilai Buku 30 Juni 2026	3.688.595.207

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan, Irigasi,
dan Jaringan : Rp
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C2.5 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp 3.741.109*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.741,109,- dan Rp. 3.741,109,-

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2026	374.109
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	374.109
Akumulasi Penyusutan sd 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	374.109

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(3.196.753,937)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp. (3.196.753,937),- dan Rp. (3.347.771,358),-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (MCP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	459,726,000	0	459,726,000
2	Peralatan dan Mesin	2,400,372,007	(2,448,808,565)	151,563,442
3	Bangunan dan Bangunan	4,587,558,000	(898,962,793)	3,688,595,207
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	374,109	0	374,109
	Jumlah	7,651,397,116	(3,347,771,358)	4,303,625,758

C4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud:
Rp. 6.500.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.500.000,- dan Rp. 6.500.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Software Antivirus	6.500.000
	Jumlah Total	6.500.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Mentok berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2024.

C5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka
Pendek:
Rp. 390.683,354*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 390,683,354 dan Rp. 555,788,898 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Mentok per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA.2026	30 Juni TA.2025
Utang kepada Pihak Ketiga	364,150,844	555,788,898
Utang Yang Belum Ditagihkan	532,510	0
Utang Muka dari KPPN	24,000,000	0
Jumlah	390,683,354	555,788,898

C5.1. Utang Muka dari KPPN

*Utang Muka dari
KPPN
Rp. 24.000,000*

Saldo Utang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 24,000,000. dan Rp. 0. Utang Muka dari KPPN merupakan utang persediaan (UP) atau tambahan utang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai utang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C6. Buitas

*Buitas
Rp 3,878,524,317*

Buitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,878,524,317 dan Rp. 3,774,031,160 Buitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Buitas.

Per tanggal 30 Juni 2026 terdapat Penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 60,612,387 dari nilai per 30 Juni TA 2026. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 4,269,207,671 sedangkan per 30 Juni TA 2025 tercatat sebesar Rp. 4,329,820,058,-.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan PNP:
Rp 148,000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 148,000 dan Rp. 0,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNP per 30 Juni TA 2026 (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	148,000	0

D2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai : Rp
3,551,259,676*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,551,259,676,- dan Rp. 1,165,429,125,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA.2026 dan 30 Juni TA.2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA.2026	30 Juni TA.2025	Nbk (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	520,758,620	44,101,900	106,656,720	28,74
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,9%	7,123	2,873	28,74
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39,430,978	36,422,226	3,008,752	7,63
Belanja Tunj. Anak PNS	14,239,088	13,229,548	1,009,540	7,09
Belanja Tunj. Struktural PNS	16,080,000	15,590,000	490,000	3,05
Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,400,000	77,100,000	(60,700,000)	(370,12)
Belanja Tunj. PPh PNS	2,489,806	10,729,011	(8.239.205)	(330,91)
Belanja Tunj. Beras PNS	34,761,600	29,764,620	4,996,980	14,37
Belanja Uang Makan PNS	57,629,000	42,482,000	15.137.000	26,27
Belanja Tunjangan Umum PNS	10,240,000	4,065,000	6.185.000	60,40
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	33,750,000	24,300,000	9.450.000	28,00
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	951,544,646	81,182,838	470.361.808	85,28
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,115,400,000	417,200,000	1.698.200.000	80,28
Belanja Gaji Pokok PPPK	106,113,175			
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,187			
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,395,240			
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,343,570			
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,250,460			
Belanja Uang Makan PPPK	14,824,000			
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,597,500			
Total Belanja Brutto	3,551,259,856	1,166,174,266	2.385.085.590	67,16
Pengembalian Belanja	180	745,161	(744.961)	(403.867,22)
Total Belanja Netto	3,551,259,676	1,165,429,125	2.385.830.551	67,18

D3. Beban Persediaan

Beban Persediaan:
Rp 23,082,650

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 23,082,650,- dan Rp 20.524.300,- Beban Persediaan merupakan beban untuk

mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	14,454,500	14,744,300	(87.800)	(0,60)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	8,426,150	5,780,000	2,646,150	45,78
Beban Persediaan Suku Cadang		0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku		0	0	0
Total Beban Persediaan	23,082,650	20,524,300	2,558,350	12,47

D4 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp
527,702,911

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 527,702,911 dan Rp. 460,434,859. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	252,536,495	241,869,800	10,666,695	4,41
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37,000	0	37.000	
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	23,000,000	(2.950.000)	(12,83)
Belanja Barang Operasional Lainnya	1,710,000	1,490,000	220.000	14,77
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,407,000	21,625,800	(1.218.800)	(5,64)
Belanja Bahan	300,000	300,000	0	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	700,000	740.000	105,71
Belanja Langganan Listrik	55,133,472		55.133.472	

Belanja Langganan Telepon	401,572	407,240	(5.668)	(1,39)
Belanja Langganan Air	3,977,814	3,395,360	582.454	17,15
Belanja Sewa	36,034,098	26,460,000	9.574.098	36,18
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80,152,191	86,143,000	(5.990.809)	(6,95)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,470,865	36,855,625	(8.384.760)	(22,75)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,052,404	18,188,034	8.864.370	48,74
Total Belanja Brutto	527,702,911	460,434,859	67.268.052	14,61
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Total Belanja Netto	527,702,911	460,434,859	67.268.052	14,61

D5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan Rp
108.876.966,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 108.876.966,- dan Rp. 133.228.625,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA.2026 dan 30 Juni TA.2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA.2026	30 Juni 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80,152,191	86,143,000	(5.990.809)	(6,95)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,724,775	41,305,625	(12.580.850)	(30,46)
Total Beban Pemeliharaan	108.876.966	127.448.625	(18.571.659)	(14,57)

D6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
27.052.404,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.052.404 dan Rp. 18.188.034. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA.2026 dan 30 Juni TA.2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA.2026	30 Juni TA.2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	27,052,404	18,188,034	8.864,370	48.737

Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	27,052,404	18,188,034	8,864,370	48.737

D7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat : Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial : Rp 0-

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik(Turun)	%
--------	--------------------	--------------------	-------------	---

Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi : Rp
105.483.837,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 105.483.837, dan Rp. 107.166.337. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Nak(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57,580,004	59,262,504	(1.682.500)	(2,84)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47,903,833	47,903,833	0	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	105.483.837	107.166.337	(1.682.500)	(1,57)
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	105.483.837	107.166.337	(1.682.500)	(1,57)

D10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang tak Tertagih
: Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihaan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain:
Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D12 Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non
Operasional : Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2026	30 Juni TA 2025	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa: Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA.2026 dan 30 Juni TA.2025

Uraian	30 Juni TA.2026	30 Juni TA.2025	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNEP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E1. Ekuitas Awal

*Bekas Awal: Rp
3,774,031,160,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Juni 2026 dan 1 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,774,031,160 dan Rp. 4,513,666,656.

E2.Surplus (defisit) LO

*Surplus (defisit) LO
: Rp (4,011,321,430)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. (4,011,321,430) dan Rp. (1,924,946,409). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E3.Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan: Rp 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA.2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0

Buku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap:
Rp. 0

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E5 Koreksi atas Beban

Koreksi Atas Beban:
Rp.0

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban per 30 Juni TA 2026 *(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E6 Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas Pendapatan:
Rp. 0-

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E7. Buktias Akhir

Buktias Akhir: Rp 3,878,524,317,- Nilai Buktias untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 3,878,524,317 dan Rp 4,214,584,231

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK pada laporan Keuangan Semester I TA 2026 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Mentok

F.2.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasi anggaran bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran serta pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian Rincian Output (RO) merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Agama Mentok telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. Rincian capaian output tersebut memuat informasi mengenai alokasi anggaran, realisasi anggaran, target keluaran, realisasi keluaran, serta persentase capaian kinerja masing-masing Rincian Output (RO). Adapun rincian capaian Rincian Output (RO) Pengadilan Agama Mentok sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut. Tabel Laporan Kinerja Unit Organisasi Pengadilan Agama Mentok:

Tabel Laporan Kinerja Unit Organisasi Pengadilan Agama Mentok

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
EBA962	Layanan Umum	1.440.000	1.440.000	100,00	1	1	Layanan	100,00	
EBA994	Layanan Perkantoran	6.929.426.000	4.077.222.767	58,84	2	0	Layanan	49,98	

EBB951	Layanan Sarana Internal	37.000.000	37.000.000	100,00	7	7	Unit	100,00	
EBDZ25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	1	1	Dokumen	100,00	

F.23 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pendapat dan belanja secara akrual yang dapat disajikan dalam laporan keuangan Semester I Tahun 2026

F.24 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Mentok adalah:

1. BRI KCP.Mentok A/C 209001000033301 a.n. BPg 015 Pengadilan Agama Mentok-01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA.BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0.

F.25 Revisi DIPA

Selama periode laporan Semester I Tahun 2026, Pengadilan Agama Mentok telah melakukan 8 (Delapan) Kali revisi DIPA:

No	Revisi	DS DPA	Tanggal Sah Revisi	Ket
1	DIPA AWAL	DS: 7000 3009 0126 4372	24 November 2025	DIPA Awal
2	Rev 1	DS: 8950-2782-1552-7827	24 Desember 2025	Revisi Pusat
3	Rev 2	DS: 8950-2782-1552-7827	05 Januari 2026	Revisi KPA
4	Rev 3	DS: 8950-2782-1552-7827	20 Januari 2026	Revisi Pergeseran Pagu
5	Rev 4	DS: 8950-2782-1552-7827	06 Februari 2026	Revisi POK dan Hal III DIPA
6	Rev 5	DS: 1010-9589-8602-5900	9 April 2026	Revisi Pusat Penambahan Pagu
7	Rev 6	DS: 1010-9589-8602-5900	27 April 2026	Revisi POK dan Hal III DIPA
8	Rev 7	DS: 9615-5110-4682-4882	17 Juni 2026	Revisi Pusat
9	Rev 8	DS: 9615-5110-4682-4882	13 Juli 2026	Revisi Hal III DIPA

F.26 Ralat SPM, SSEP, dan SSFB

Tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSEP, SSFB pada periode Semester I Tahun Anggaran 2026.

F.27 Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat kami ungkapkan dalam Laporan Keuangan ini.

LAPORAN PENDUKUNG

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	148,000	0	148,000	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	148,000	0	148,000	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	148,000	0	148,000	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,373,396,671	1,317,843,110	2,055,553,561	155.979
Beban Persediaan	14,656,500	14,744,300	(87,800)	(0.595)
Beban Barang dan Jasa	371,703,152	333,776,003	37,927,149	11.363
Beban Pemeliharaan	117,303,116	133,228,625	(15,925,509)	(11.954)
Beban Perjalanan Dinas	27,052,404	18,188,034	8,864,370	48.737

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	107,357,587	107,166,337	191,250	0.178
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,011,469,430	1,924,946,409	2,086,523,021	108.394
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,011,321,430)	(1,924,946,409)	(2,086,375,021)	108.386
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,011,321,430)	(1,924,946,409)	(2,086,375,021)	108.386
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,011,321,430)	(1,924,946,409)	(2,086,375,021)	108.386

Keterangan :
FINAL

Mentok, 20 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DENNERI
197703172011011001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,774,031,160	4,513,666,656	(739,635,496)	(16.39)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,011,321,430)	(1,924,946,409)	(2,086,375,021)	108.39
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,115,814,587	1,625,863,984	2,489,950,603	153.15
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	104,493,157	(299,082,425)	403,575,582	(134.94)
EKUITAS AKHIR	3,878,524,317	4,214,584,231	(336,059,914)	(7.97)

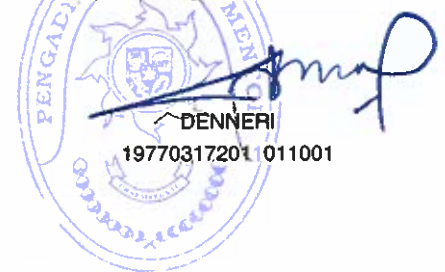
Keterangan :

FINAL

Mentok, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	11,579,150	(11,579,150)	(100.00)
Persediaan	5,439,500	8,115,150	(2,675,650)	(32.97)
JUMLAH ASET LANCAR	29,439,500	19,694,300	9,745,200	49.48
ASET TETAP				
Tanah	459,726,000	459,726,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,378,996,999	2,600,372,007	(221,375,008)	(8.51)
Gedung dan Bangunan	4,587,558,000	4,587,558,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,741,109	3,741,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,196,753,937)	(3,347,771,358)	151,017,421	(4.51)
JUMLAH ASET TETAP	4,233,268,171	4,303,625,758	(70,357,587)	(1.63)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,500,000	6,500,000	0	0.00
Aset Lain-lain	258,375,008	0	258,375,008	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(258,375,008)	0	(258,375,008)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	6,500,000	6,500,000	0	0.00
JUMLAH ASET	4,269,207,671	4,329,820,058	(60,612,387)	(1.40)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	366,150,844	555,788,898	(189,638,054)	(34.12)
Utang Yang Belum Ditagihkan	532,510	0	532,510	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	390,683,354	555,788,898	(165,105,544)	(29.71)
JUMLAH KEWAJIBAN	390,683,354	555,788,898	(165,105,544)	(29.71)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,878,524,317	3,774,031,160	104,493,157	2.77
JUMLAH EKUITAS	3,878,524,317	3,774,031,160	104,493,157	2.77
JUMLAH EKUITAS	3,878,524,317	3,774,031,160	104,493,157	2.77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,269,207,671	4,329,820,058	(60,612,387)	(1.40)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Mentok, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENNERI

197703172011011001 197703172011011001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,485,000	0	1,485,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	11,579,150	(11,579,150)	(100.00)
Persediaan	2,399,500	1,298,000	1,101,500	84.86
JUMLAH ASET LANCAR	27,884,500	12,877,150	15,007,350	116.54
ASET TETAP				
Tanah	459,726,000	459,726,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,578,942,007	2,578,942,007	0	0.00
Gedung dan Bangunan	4,587,558,000	4,587,558,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,741,109	3,741,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,241,863,766)	(3,134,697,429)	(107,166,337)	3.42
JUMLAH ASET TETAP	4,388,103,350	4,495,269,687	(107,166,337)	(2.38)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,500,000	6,500,000	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	6,500,000	6,500,000	0	0.00
JUMLAH ASET	4,422,487,850	4,514,646,837	(92,158,987)	(2.04)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	177,730,985	980,181	176,750,804	18,032.47
Utang Yang Belum Ditagihkan	6,172,634	0	6,172,634	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	207,903,619	980,181	206,923,438	21,110.74
JUMLAH KEWAJIBAN	207,903,619	980,181	206,923,438	21,110.74
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,214,584,231	4,513,666,656	(299,082,425)	(6.63)
JUMLAH EKUITAS	4,214,584,231	4,513,666,656	(299,082,425)	(6.63)
JUMLAH EKUITAS	4,214,584,231	4,513,666,656	(299,082,425)	(6.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,422,487,850	4,514,646,837	(92,158,987)	(2.04)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

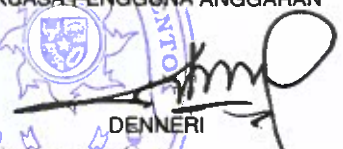
Tgl Cetak : 20/07/26 8:44 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Mentok, 20 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENNERI
197703172011011001 197703172011011001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,696,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,743,000	0
0.0	131111	Tanah	459,726,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,378,996,999	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,587,558,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,741,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,249,887,311
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	946,866,626
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	6,500,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	258,375,008	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	258,375,008
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	366,150,844
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	532,510
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,115,962,587
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	148,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	3,774,031,160
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	148,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	589,075,020	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,958	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	44,415,938	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,115,572	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18,090,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	18,450,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,480,266	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	39,179,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	57,629,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,520,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	39,150,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	470,892,238	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,910,800,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	120,749,475	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,464	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,001,480	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,528,890	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	7,507,500	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	252,799,095	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	53,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,710,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	44,129,111	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	401,572	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,207,126	0
3.0	522141	Beban Sewa	47,613,248	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80,152,191	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28,724,775	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27,052,404	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57,580,004	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47,903,833	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,873,750	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,656,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,426,150	0
JUMLAH			11,735,954,046	11,735,954,046

Keterangan :

FINAL

Mentok, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Tgl Data : 14/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 8:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,625,863,984
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	414,101,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7,123	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36,422,226	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	13,229,548	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,590,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	77,100,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,729,011	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	29,764,620	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	42,492,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4,055,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	24,300,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	81,182,838	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	417,200,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	241,869,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	23,000,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,490,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,625,800	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	407,240	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,395,360	0
3.0	522141	Belanja Sewa	26,460,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86,143,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36,855,625	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,188,034	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	141
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	745,000
JUMLAH			1,626,609,125	1,626,609,125

Keterangan :

FINAL

Mentok, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENNERI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MENTOK 682249

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM
Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM
Halaman : 1
lap_face_satker_new_joc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI A (BAWAH) ANGG	
1	2	4	5	6	7	8	9	
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0		
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0		
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0		
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0		
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	148,000	148,000	0	210,000	0	21	
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0		
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0		
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0		
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	148,000	148,000	0	210,000	0	21	
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0		
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	148,000	148,000	0	210,000	0	21	
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0		
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,968,166,000	4,115,962,587	(2,852,203,413)	59	2,819,714,000	1,625,863,984	1,193,85	
1. Belanja Pegawai	5,674,382,000	3,551,259,676	(2,123,122,324)	63	1,790,463,000	1,165,429,125	625,03	
2. Belanja Barang	1,256,784,000	527,702,911	(729,081,089)	42	1,029,251,000	460,434,859	568,81	
3. Belanja Modal	37,000,000	37,000,000	0	100	0	0		
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0		
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0		
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0		
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0		
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0		
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0		
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 (DALAM RUPIAH)



TERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
 : PENGADILAN AGAMA MENTOK 682249

Tgl Data : 20/07/26 6:39 AM
 Tgl Cetak : 20/07/26 8:38 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9
a Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0
a Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0
na Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0
na Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0
iah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0
a Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
a Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
a Desa	0	0	0	0	0	0	0
ntif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Negara (B.I + B.II)	6,968,166,000	4,115,962,587	(2,852,203,413)	59	2,819,714,000	1,625,863,984	1,193,850,016
JAYAAAN	0	0	0	0	0	0	0
							58

an :

Mentok, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA-PENGGUNA ANGGARAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



ITERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 N I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 AH/PROVINSI : 3000 BANGKA BELITUNG
 N KERJA : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK
 SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 20/07/26 8:40 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 20/7/26 6:51 AM

:	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			%	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	BELANJA PEGAWAI							
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
	Belanja Gaji Pokok PNS	903,000,000	904,286,000	520,758,620	0	520,758,620	57.59	383,527,380
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24,000	24,000	9,996	180	9,816	40.9	14,184
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	68,800,000	68,800,000	39,430,978	0	39,430,978	57.31	29,369,022
	Belanja Tunj. Anak PNS	24,850,000	24,850,000	14,239,088	0	14,239,088	57.3	10,610,912
	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	16,080,000	0	16,080,000	57.14	12,060,000
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	29,870,000	29,870,000	16,400,000	0	16,400,000	54.9	13,470,000
	Belanja Tunj. PPh PNS	490,000	490,000	2,489,806	0	2,489,806	508.12	(1,999,806)
	Belanja Tunj. Beras PNS	53,000,000	53,000,000	34,761,600	0	34,761,600	65.59	18,238,400
	Belanja Uang Makan PNS	214,452,000	214,452,000	57,629,000	0	57,629,000	26.87	156,823,000
	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,510,000	20,510,000	10,240,000	0	10,240,000	49.93	10,270,000
	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	64,800,000	33,750,000	0	33,750,000	52.08	31,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,407,936,000	1,409,222,000	745,789,088	180	745,788,908	52.92	663,433,092
	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	134,400,000	839,548,000	551,544,646	0	551,544,646	65.7	288,003,354
	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,013,600,000	3,376,600,000	2,115,400,000	0	2,115,400,000	62.65	1,261,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,148,000,000	4,216,148,000	2,666,944,646	0	2,666,944,646	63.26	1,549,203,354
	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
	Belanja Gaji Pokok PPPK	30,000	30,000	106,113,175	0	106,113,175	353,710.58	(106,083,175)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,000	30,000	2,187	0	2,187	7.29	27,813
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,000	30,000	4,395,240	0	4,395,240	14,650.8	(4,365,240)
	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30,000	30,000	1,343,570	0	1,343,570	4,478.57	(1,313,570)
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,000	10,000	5,250,450	0	5,250,450	52,504.5	(5,240,450)
	Belanja Uang Makan PPPK	48,852,000	48,852,000	14,824,000	0	14,824,000	30.34	34,028,000
	Belanja Tunjangan Umum PPPK	30,000	30,000	6,597,500	0	6,597,500	21,991.67	(6,567,500)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	49,012,000	49,012,000	138,526,122	0	138,526,122	282.64	(89,514,122)
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,604,948,000	5,674,382,000	3,551,259,856	180	3,551,259,676	62.58	2,123,122,324
	BELANJA BARANG							
	Belanja Barang Operasional							
	Belanja Keperluan Perkantoran	590,494,000	577,694,000	252,536,495	0	252,536,495	43.71	325,157,505
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200,000	188,000	37,000	0	37,000	19.68	151,000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,120,000	48,120,000	20,050,000	0	20,050,000	41.67	28,070,000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,000,000	4,600,000	1,710,000	0	1,710,000	37.17	2,890,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



TERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LRA.B.S.2
N I : 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal : 20/07/26 8:40 AM
AH/PROVINSI : 3000	BANGKA BELITUNG	Halaman : 2
N KERJA : 682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
SATUAN KERJA : KD		Tgl Data : 20/7/26 6:51 AM

	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
				5	6	7=5-6		9=4-7
	2	3	4				8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	645,814,000	630,602,000	274,333,495	0	274,333,495	43.5	356,268,505
	Belanja Barang Non Operasional							
	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan							
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43,253,000	43,253,000	20,407,000	0	20,407,000	47.18	22,846,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,253,000	43,253,000	20,407,000	0	20,407,000	47.18	22,846,000
	Belanja Jasa							
	Belanja Langganan Listrik	144,420,000	115,536,000	55,133,472	0	55,133,472	47.72	60,402,528
	Belanja Langganan Telepon	2,400,000	2,400,000	401,572	0	401,572	16.73	1,998,428
	Belanja Langganan Air	9,600,000	9,600,000	3,977,814	0	3,977,814	41.44	5,622,186
	Belanja Sewa	84,080,000	85,350,000	36,034,098	0	36,034,098	42.22	49,315,902
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	240,500,000	212,886,000	95,546,956	0	95,546,956	44.88	117,339,044
	Belanja Pemeliharaan							
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,100,000	184,695,000	80,152,191	0	80,152,191	43.4	104,542,809
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111,430,000	113,588,000	28,470,865	0	28,470,865	25.07	85,117,135
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	279,530,000	298,283,000	108,623,056	0	108,623,056	36.42	189,659,944
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,020,000	70,020,000	27,052,404	0	27,052,404	38.64	42,967,596
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,020,000	70,020,000	27,052,404	0	27,052,404	38.64	42,967,596
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,281,217,000	1,256,784,000	527,702,911	0	527,702,911	41.99	729,081,089
	BELANJA MODAL							
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	100	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	3,923,165,000	6,968,166,000	4,115,962,767	180	4,115,962,587	59.07	2,852,203,413

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

TERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
N I : 01
AH/PROVINSI : 3000
N KERJA : 682249

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 20/07/26 8:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_ira_pen_akun_satker

	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
	Pendapatan Denda					
1	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	148,000	0	148,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	148,000	0	148,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	148,000	0	148,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	148,000	0	148,000	

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN**Bulan: Juni 2026**

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi/Kabupaten/Kot : (30.03) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB. BANGKA BARAT
Satuan Kerja : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK
Tgl, No. SP DIPA : 01 Desember 2025 , DIPA-005.01.2.682249/2026
Tahun Anggaran : 2026
KPPN : (015) Pangkal Pinang
Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00
3. Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	0,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



DENNERI

197703172011011001

KAB. BANGKA BARAT , 02 Juli 2026

Bendahara Penerimaan



IMANIAR

NIP 199709232020122012

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Dicetak pada tanggal 02 Juli 2026

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**Bulan: Juni 2026**

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025 , DIPA-
005.01.2.682249/2026

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2026

Provinsi/Kabupaten/Kota : (30.03) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / KAB.
BANGKA BARAT

KPPN : (015) Pangkal Pinang

Satuan Kerja : (682249) PENGADILAN AGAMA MENTOK

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 23.467.490,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00249/KW/682249/2026

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	24.000.000,00	38.100.880,00	38.633.390,00	23.467.490,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	24.000.000,00	38.100.880,00	38.633.390,00	23.467.490,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	24.000.000,00	21.057.590,00	21.590.100,00	23.467.490,00
	1. BP UP*)	24.000.000,00	15.603.290,00	16.135.800,00	23.467.490,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	184.300,00	184.300,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 532.510,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	23.467.500,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	23.467.500,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	23.467.490,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	23.467.500,00
3. Selisih Kas	Rp.	(10,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	23.467.490,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	532.510,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	24.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	24.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : (10,00) karena tidak ada pecahan kecil
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-



Mengetahui
Kuasasa Pengguna Anggaran

DENNERI

197703172011011001

KAB. BANGKA BARAT, Juni 2026

Bendahara Pengeluaran

ANNISYA KARINA

NIP 199808062022032011

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (003)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN AGAMA MENTOK (862249)
Rekening Induk : RIKK BUA MA OPS (032901xxxxx304)
Virtual Account : 653256822491000 | BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK 01
Periode : 01-06-2026 s/d 30-06-2026

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-05	10:38:38	55037338	From 032901003295305 to 653256822491000 Pembayaran Honorarium Team Pengelola Keuangan TA 2026 untuk bulan Mei 2026 untuk 7 orang sesuai deng 280150000019786000001	0,00	0,00	3.830.000,00	3.830.000,00	SPAN	
2026-06-08	10:10:24	55211496	BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK 01	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2026-06-17	16:24:01	55884211	From 653256822491000 to 653256822491000 SETORAN 65325_8822491000 653256822491000 dan 653256822491000	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	BRIVA	
2026-06-22	11:13:34	55979751	From 653256822491000 to - BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK 01 transfer ke -	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	INDS	
2026-06-25	13:51:39	56121719	From 032901003295305 to 653256822491000 Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang 280150000023359000001	0,00	0,00	15.603.290,00	15.603.290,00	SPAN	
2026-06-29	09:05:07	56195781	From 653256822491000 to - BPG 015 PENGADILAN AGAMA MENTOK 01 transfer ke -	15.603.290,00	15.603.290,00	0,00	0,00	INDS	
Total Mutasi					20.873.290,00	20.873.290,00			
Saldo Akhir							0,00		

**RINCIAN SURPLUS/DEFISIT-LO TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026**

Akun	Uraian	2026
391112	Surplus/Defisit-LO	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	148,000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	148,000
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-589,075,020
511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	-589,075,020
511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	-2,480,266
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-39,179,220
511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	-39,179,220
511129	Beban Uang Makan PNS	-57,629,000
511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-57,629,000
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-10,958
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-10,958
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-44,415,938
511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-44,415,938
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-16,115,572
511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-16,115,572
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-18,090,000
511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-18,090,000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-18,450,000
511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	-18,450,000
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-2,480,266
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-11,520,000
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-11,520,000
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-39,150,000
511157	Pengembalian Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-39,150,000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	-120,749,475
511611	Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	-120,749,475
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	-2,464
511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	-2,464
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-5,001,480
511621	Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-5,001,480
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	-1,528,890
511622	Pengembalian Beban Tunjangan Anak PPPK	-1,528,890
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	-5,974,650
511625	Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	-5,974,650
511628	Beban Uang Makan PPPK	-14,824,000
511628	Pengembalian Beban Uang Makan PPPK	-14,824,000
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	-7,507,500
511633	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PPPK	-7,507,500
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-470,892,238
511324	Pengembalian Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	-470,892,238
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-1,910,800,000

523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-28,724,775
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-57,580,004
591111	Pengembalian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-57,580,004
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-47,903,833
591211	Pengembalian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-47,903,833
522111	Beban Langganan Listrik	-44,129,111
522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	-44,129,111
522112	Beban Langganan Telepon	-401,572
522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	-401,572
522113	Beban Langganan Air	-3,207,126
522113	Pengembalian Beban Langganan Air	-3,207,126
591313	Beban Penyusutan Jaringan	0
591313	Pengembalian Beban Penyusutan Jaringan	0
522141	Beban Sewa	-47,613,248
522141	Pengembalian Beban Sewa	-47,613,248
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-27,052,404
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-27,052,404
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	-1,873,750
592222	Pengembalian Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	-1,873,750
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-80,152,191
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0
521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0
521211	Beban Bahan	-300,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-300,000
593131	Beban Persediaan bahan baku	0
593131	Pengembalian Beban Persediaan bahan baku	0
593111	Beban Persediaan konsumsi	-14,656,500
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-14,656,500
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-8,426,150
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-8,426,150
521111	Beban Keperluan Perkantoran	-252,799,095
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	-252,799,095
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-1,440,000
521252	Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-1,440,000
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-53,000
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-53,000
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-20,050,000
521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-20,050,000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	-1,710,000
521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-1,710,000
JUMLAH		-8,022,642,860



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 682249 - PENGADILAN AGAMA MENTOK
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 20/07/26 11:05

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,968,166,000	6,968,166,000	0
2	Belanja	4,115,962,767	4,115,962,767	0
3	Pengembalian Belanja	-180	-180	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	148,000	148,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	24,000,000	24,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	24,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16 Juli 2026



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 682249 Pengadilan Agama Mentok
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 01 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja Sewa Web Hosting Bulan Januari s.d
 Kategori Jurnal Penyesuaian November 2026 (11 bulan)

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	522141	Beban Sewa Web Hosting	11.477.400	
	114112	Belanja Dibayar Dimuka		11.477.400

Direkam Tanggal : 01 April 2026

Operator SAKTI

Muhamad Deni Saputra, S.Kom

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Denneri, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 682249 Pengadilan Agama Mentok
 No. Dokumen : 006
 Tanggal : 01 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja Sewa Domain Bulan Januari s.d
 Kategori Jurnal Penyesuaian November 2026 (11 bulan)

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☒ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	114112	Belanja Dibayar Dimuka		101.750
	522141	Beban Sewa Domain	101.750	

Direkam Tanggal : 01 April 2026
 Operator SAKTI



Muhamad Deni Saputra, S.Kom

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Denneri, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 682249 Pengadilan Agama Mentok
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 01 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Tagihan Listrik Bulan Desember 2025
 Kategori Jurnal Penyesuaian : Dibayarkan Bulan Januari 2026

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	522111	Beban Langganan Listrik		11.004.361
	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	11.004.361	

Direkam Tanggal : 01 April 2026
 Operator SAKTI

Disetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran



Muhamad Deni Saputra, S.Kom



Denneri, S.E.



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 682249 Pengadilan Agama Mentok
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 01 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Tagihan Air Bulan Desember 2025 Dibayarkan
 Kategori Jurnal Penyesuaian : Bulan Januari 2026

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	522113	Beban Langganan Air		770.688
	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	770.688	

Direkam Tanggal : 01 April 2026
 Operator SAKTI



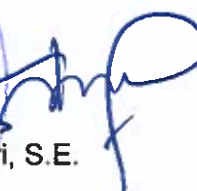
Muhamad Deni Saputra, S.Kom

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Denneri, S.E.



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 682249 Pengadilan Agama Mentok
 No. Dokumen : 003
 Tanggal : 01 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja Pegawai Gaji Pokok, Tunjangan Istri dan
 Kategori Jurnal Penyesuaian Tunjangan Anak a.n. Iman Herlambang, S.H., M.H. Bulan
 Desember 2025 Dibayarkan Bulan Januari 2026

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	511111	Belanja Gaji Pokok		104.600
	511121	Belanja Tunjangan Istri		10.460
	511122	Belanja Tunjangan Anak		4.184
	411121	Tunjangan Pajak Penghasilan		9.540
	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	128.784	

Direkam Tanggal : 01 April 2026

Operator SAKTI



Muhamad Deni Saputra, S.Kom

Disetujui

Kuasa Pengguna Anggaran



Denneri, S.E.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
 Eselon I : 01 Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : 3000 Bangka Belitung
 Satuan Kerja : 682249 Pengadilan Agama Mentok
 No. Dokumen : 005
 Tanggal : 01 April 2026
 Tahun Anggaran : 2026
 Keterangan : Jurnal Balik Kekurangan Gaji Hakim Bulan Oktober s.d.
 Kategori Jurnal Penyesuaian : Desember 2025 (3 bulan)

☐ Pendapatan Diterima Dimuka	☐ Kas di Bendahara Penerimaan
☐ Pendapatan yang Masih Harus Dibayar	☐ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☒ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Persekot Gaji
☐ Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	☐ Selisih Kurs
☐ Penyusutan dan Amortisasi	☐ Transfer
☐ Persediaan	☐ Reklasifikasi
☐ Uang Muka Belanja	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	☐ Koreksi Lainnya
☐ Pembentukan/Koreksi/Reklasifikasi Piutang	☐ RPATA

No.	Kode Akun	Uraian Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	511339	Beban Penghasilan Pejabat Negara		417.000.000
	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	417.000.000	
2	511324	Beban Tunj. PPH Pejabat Negara		126,885,065
	212111	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	126,885,065	

Direkam Tanggal : 01 April 2026
 Operator SAKTI


 Muhamad Deni Saputra, S.Kom

Disetujui
 Kuasa Pengguna Anggaran


 Denneri, S.E.

JURNAL PENYESUAIAN KHUSUS
TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE :2026-04

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON 1 : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 682249
JENIS KEWENANGAN : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
PENGADILAN AGAMA MENTOK
Kantor Daerah

Tanggal :
Halaman :

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT	VI
01-04-2026	005	Jurnal Baik Kekurangan Beban Tunj. PPH	682249.015.212111.0050100.00000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	126,885,065.00	0.00	
01-04-2026	005	Jurnal Baik Kekurangan Beban Tunj. PPH	682249.015.511324.0050100.00000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0.00	126,885,065.00	
01-04-2026	003	Jurnal Baik Tunjangan Pajak Penghasilan	682249.015.511125.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	0.00	9,540.00	
01-04-2026	003	Jurnal Baik Tunjangan Pajak Penghasilan	682249.015.212111.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	9,540.00	0.00	
01-04-2026	003	Jurnal Baik Tunjangan Anak susulan bulan	682249.015.212111.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	4,184.00	0.00	
01-04-2026	003	Jurnal Baik Tunjangan Anak susulan bulan	682249.015.511122.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.00	4,184.00	
01-04-2026	003	Jurnal baik Gaji Pokok susulan bulan	682249.015.212111.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	104,600.00	0.00	
01-04-2026	003	Jurnal baik Gaji Pokok susulan bulan	682249.015.511111.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.00	104,600.00	
01-04-2026	003	Jurnal baik Tunjangan Istri susulan bulan	682249.015.212111.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	10,460.00	0.00	
01-04-2026	003	Jurnal baik Tunjangan Istri susulan bulan	682249.015.511121.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.00	10,460.00	
01-04-2026	006	Jurnal Baik Domain	682249.015.114112.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	114112	Belanja barang yang dibayar di muka	0.00	101,750.00	
01-04-2026	006	Jurnal Baik Domain	682249.015.522141.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	522141	Belanja Sewa	101,750.00	0.00	
01-04-2026	004	Jurnal Baik Sewa Web	682249.015.522141.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	522141	Belanja Sewa	11,477,400.00	0.00	
01-04-2026	004	Jurnal Baik Sewa Web	682249.015.114112.0050100.00000000.000000.000000.000000.2.3003.2.000000.00	114112	Belanja barang yang dibayar di muka	0.00	11,477,400.00	

JURNAL PENYESUAIAN KHUSUS

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE :2026-04

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON 1 : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 682249
JENIS KEWENANGAN : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
PENGADILAN AGAMA MENTOK
Kantor Daerah

Tanggal :
Halaman :

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO. AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT	V/
01-04-2026	002	Jurnal Balik Tagihan Air bulan Desember 2025	682249.015.212112.0050100.00000000.000000 00000.00000.2.3003.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	770,688.00	0.00	
01-04-2026	002	Jurnal Balik Tagihan Air bulan Desember 2025	682249.015.522113.0050100.00000000.000000 00000.00000.2.3003.2.000000.00	522113	Belanja Langganaan Air	0.00	770,688.00	
01-04-2026	001	Jurnal Balik Belanja Langgana Listrik	682249.015.522111.0050100.00000000.000000 00000.00000.2.3003.2.000000.00	522111	Belanja Langganaan Listrik	0.00	11,004,361.00	
01-04-2026	001	Jurnal Balik Belanja Langgana Listrik	682249.015.212112.0050100.00000000.000000 00000.00000.2.3003.2.000000.00	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	11,004,361.00	0.00	
						150,368,048.00	150,368,048.00	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2026-04

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON 1 : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROPINSI : 3000 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
 SATUAN KERJA : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Tanggal : 23-07-2026
 Halaman : 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
01-04-2026	005	Jurnal Balik Kekurangan Penghasilan Pejabat Negara Bulan oktober s.d. Desember 2025	682249.015.212111.0050100.0000000. 0000000000.000000.2.3003.2.000000.0 00000	212111	AKRUAL	417,000,000	0	Sudah
01-04-2026	005	Jurnal Balik Kekurangan Penghasilan Pejabat Negara Bulan oktober s.d. Desember 2025	682249.015.511339.0050100.0000000. 0000000000.000000.2.3003.2.000000.0 00000	511339	AKRUAL	0	417,000,000	Sudah
						417,000,000	417,000,000	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA MENTOK**

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Belo Laut, Mentok, Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung, 33351
pa.mentok@gmail.com

www.pa-mentok.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA

Pada Pengadilan Agama Mentok

Periode Semester I - Tahun Anggaran 2026

Nomor : 881/SEK.PA.W28-A4/PL1.2.7/VII/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Mentok, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Annisa Minda Septira, ST
NIP : 199709172025062000
Jabatan : Operator Aset dan Persediaan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II Nama : Muhamad Deni Saputra, S.Kom.
NIP : 199412052020121005
Jabatan : Operator GLP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/ Barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) untuk periode Semester I - Tahun Anggaran 2026, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No		Nilai BMN Periode Semester I Tahun Anggaran 2026		
		Akun Neraca	Saldo Awal	Mutasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)		4.318.240.908,00	(70.357.587,00)
A	ASET LANCAR		8.115.150,00	-
1	Persediaan		8.115.150,00	-
B	ASET TETAP		4.303.625.758,00	(70.357.587,00)
1	Tanah		459.726.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin		2.600.372.007,00	(221.375.008,00)
3	Gedung dan Bangunan		4.587.558.000,00	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
5	Aset Tetap dalam Renovasi		-	-
6	Aset Tetap Lainnya		3.741.109,00	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(3.347.771.358,00)	151.017.421,00
C	ASET LAINNYA		6.500.000,00	-
1	Aset Tidak Berwujud		6.500.000,00	-
2	Aset Lain-lain		-	258.375.008,00
3	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga		-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	(258.375.008,00)
II	BMN NON NERACA		-	-
1	Ekstrakomptabel		-	-
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel		-	-
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)		4.318.240.908,00	(70.357.587,00)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Periode Semester I Tahun Anggaran 2026, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset dan Persediaan

Annisa Minda Septira, S.T.
NIP 199709172025062014

Operator GLP

Muhamad Deni Saputra, S.Kom.
NIP 199412052020121005





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA MENTOK**

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Belo Laut, Mentok, Bangka Barat,
Kepulauan Bangka Belitung. 33351. www.pa-mentok.go.id, pa.mentok@gmail.com

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
PENGADILAN AGAMA MENTOK**

Nomor: 873/SEK.PA.W28-A4/PL1.2.5/VI/2026

Nama Satker : Pengadilan Agama Mentok
Kode Satker : 682249
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
BA : Mahkamah Agung RI

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Pengadilan Agama Mentok, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Fisik Persediaan :

1. Nama : Muhamad Deni Saputra, S.Kom.
NIP : 199412052020121005
Jabatan : Ketua/Kasubbag Umum dan Keuangan
2. Nama : Muhamad Deni Saputra, S.Kom.
NIP : 199412052020121005
Jabatan : Anggota/Operator GLP
3. Nama : Annisa Minda Sepira, S.T.
NIP : 199709172025062014
Jabatan : Anggota/Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan opname fisik Persediaan Bulan Juni Tahun 2026, dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (opname fisik)

1. Muhamad Deni Saputra, S.Kom. 
2. Muhamad Deni Saputra, S.Kom. 
3. Annisa Minda Septira, S.T. 

Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Mentok



Denneri, S.E.

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Agama Mentok
 Kode Satker : 682249
 UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
 UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi
 BA : Mahkamah Agung

Kode	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1010301001 (Alat Tulis)			
1010301001000202	Spidol Permanent	1,	70.000,
1010301001000412	Pulpen Deboz	2,	60.000,
1010301001000430	Highlighter	1,	30.000,
Jumlah Kode Barang 1010301001 (Alat Tulis)			160.000,
1010301003 (Penjepit Kertas)			
1010301003000201	Binder Clips	1,	7.000,
1010301003000303	Binder Clips No. 260	2,	42.000,
1010301003000305	Binder 280	2,	60.000,
1010301003000319	pembolong kertas	2,	40.000,
1010301003000320	Binder Clips No.200	2,	30.000,
1010301003000321	Binder Clip no 280	4,	120.000,
Jumlah Kode Barang 1010301003 (Penjepit Kertas)			299.000,
1010301004 (Penghapus/Korektor)			
1010301004000101	Penghapus Pensil	1,	11.000,
1010301004000209	Correction Tape	1,	31.000,
Jumlah Kode Barang 1010301004 (Penghapus/Korektor)			42.000,
1010301005 (Buku Tulis)			
1010301005000103	Buku Ekspedisi	2,	30.000,
1010301005000104	Buku Folio	2,	80.000,
1010301005000204	Buku Kwitansi Besar	1,	5.000,
1010301005000204	Buku Kwitansi Besar	2,	16.000,
Jumlah Kode Barang 1010301005 (Buku Tulis)			131.000,
1010301006 (Ordner Dan Map)			
1010301006000219	expanding file	3,	129.000,
Jumlah Kode Barang 1010301006 (Ordner Dan Map)			129.000,
1010301007 (Penggaris)			
1010301007000201	Penggaris Besi 30 cm	1,	10.000,
Jumlah Kode Barang 1010301007 (Penggaris)			10.000,
1010301008 (Cutter (Alat Tulis Kantor))			
1010301008000104	Isi Cutter	1,	8.000,
1010301008000104	Isi Cutter	3,	30.000,
Jumlah Kode Barang 1010301008 (Cutter (Alat Tulis Kantor))			38.000,
1010301010 (Alat Perekat)			
1010301010000301	Lakban Hitam 2	3,	51.000,

1010301010000401	Isolasi Bening Kecil	1,	4.000,
1010301010000401	Isolasi Bening Kecil	2,	60.000,
1010301010000402	Isolasi Bening Besar	2,	16.000,
1010301010000501	Lem Stick	4,	60.000,
1010301010000602	Lakban Hitam 1	1,	5.000,
1010301010000602	Lakban Hitam 1	1,	32.000,
1010301010000604	Double Tape Hijau	1,	12.000,
1010301010000611	Isolasi Kabel Unibel	1,	12.500,
1010301010000612	Double Tape 1/2	1,	14.000,
Jumlah Kode Barang 1010301010 (Alat Perekat)			266.500,

Kode	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1010301012 (Staples)			
1010301012000108	Stapler	1,	21.500,
Jumlah Kode Barang 1010301012 (Staples)			21.500,
1010301999 (Alat Tulis Kantor Lainnya)			
1010301999000102	Gunting Sedang	2,	27.000,
1010301999000103	Box File	6,	210.000,
1010301999000142	PU Mouse Pad	1,	18.000,
1010301999000142	PU Mouse Pad	2,	36.000,
1010301999000157	HEADSET	1,	140.000,
Jumlah Kode Barang 1010301999 (Alat Tulis Kantor Lainnya)			431.000,
1010302001 (Kertas HVS)			
1010302001000102	Kertas A4	10,	550.000,
1010302001000103	Kertas F4	3,	171.000,
Jumlah Kode Barang 1010302001 (Kertas HVS)			721.000,
1010302002 (Berbagai Kertas)			
1010302002000105	Kertas Stiker	1,	30.000,
1010302002000114	Sign Here	15,	180.000,
1010302002000118	Tissue Nice 1000 gr	6,	222.000,
1010302002000122	Sticky Notes XSD2202	2,	24.000,
1010302002000122	Sticky Notes XSD2202	3,	49.500,
Jumlah Kode Barang 1010302002 (Berbagai Kertas)			505.500,
1010302003 (Kertas Cover)			
1010302003000105	Kertas Kambing	1,	35.000,
Jumlah Kode Barang 1010302003 (Kertas Cover)			35.000,
1010302004 (Amplop)			
1010302004000102	Amplop Coklat Sedang	1,	23.000,
1010302004000104	Amplop Coklat Uk Map	1,	50.000,
1010302004000202	Amplop Putih Besar	1,	27.000,
Jumlah Kode Barang 1010302004 (Amplop)			100.000,
1010304004 (Tinta/Toner Printer)			
1010304004000101	Cartridge 810 Black	1,	250.000,
1010304004000202	Refill Tinta Warna	6,	300.000,

Jumlah Kode Barang 1010304004 (Tinta/Toner Printer)			550.000,
1010304006 (USB/Flash Disk)			
1010304006000112	Flashdisk 16 GB Sandisk	1,	105.000,
Jumlah Kode Barang 1010304006 (USB/Flash Disk)			105.000,
1010304010 (Mouse)			
1010304010000004	Wireless Mouse	2	152.000,
Jumlah Kode Barang 1010304010 (Mouse)			152.000,
1010305001 (Sapu Dan Sikat)			
1010305001000001	Sapu Lantai	1,	46.500,
1010305001000005	Sapu Lidi	1,	10.000,
Jumlah Kode Barang 1010305001 (Sapu Dan Sikat)			56.500,
1010305002 (Alat-Alat Pel Dan Lap)			
1010305002000116	Kanebo	2,	29.000,
Jumlah Kode Barang 1010305002 (Alat-Alat Pel Dan Lap)			29.000,

Kode	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1010305003 (Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya)			
1010305003000016	Bidet Spray	1,	76.500,
Jumlah Kode Barang 1010305003 (Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya)			76.500,
1010305008 (Bahan Kimia Untuk Pembersih)			
1010305008000103	Wipol Refill	1,	14.500,
1010305008000134	So Klin Lantai	8,	88.000,
1010305008000135	Sunlight Refill 635ml	5,	55.000,
1010305008000140	Yuri Hand Soap Ref 375 ML	3,	45.000,
1010305008000140	Yuri Hand Soap Ref 375 ML	3,	63.000,
1010305008000144	Carrera Shampoo Mobil	1,	16.000,
1010305008000166	Wipol 750ml	1,	20.000,
1010305008000166	Wipol 750ml	1,	19.000,
1010305008000173	Vixal 160ml	1,	5.000,
1010305008000173	Vixal 160ml	1,	6.500,
Jumlah Kode Barang 1010305008 (Bahan Kimia Untuk Pembersih)			332.000,
1010305012 (Pengharum Ruangan)			
1010305012000101	Bayfresh	2,	25.000,
1010305012000206	Stella Matic	3,	100.500,
1010305012000206	Stella Matic	5,	167.500,
1010305012000211	Dahlia Lemon	2,	22.000,
1010305012000211	Dahlia Lemon	2,	22.000,
1010305012000245	Bay Fresh	4,	42.000,
1010305012000247	Glade Diamond 80ml	2,	78.000,
1010305012000249	Stella Daily Freshness	2,	39.000,
1010305012000252	STELLA FUN N FRESH	2,	21.000,
1010305012000252	STELLA FUN N FRESH	4,	40.000,
1010305012000254	Dahlia Aerosol Matic	3,	99.000,
1010305012000254	Dahlia Aerosol Matic	5,	165.000,
Jumlah Kode Barang 1010305012 (Pengharum Ruangan)			821.000,

1010305999 (Perabot Kantor Lainnya)			
1010305999000445	Kotak APAR	1	350.000,
1010305999000512	Bendera Merah Putih Uk 180 x 120	2	70.000,
1010305999000546	Busa Pencuci	1	8.000,
Jumlah Kode Barang 1010305999 (Perabot Kantor Lainnya)			428.000,
TOTAL			5.439.500,

Tim Pelaksana Opname Fisik:

1. Muhamad Deni Saputra, S.Kom.



2. Muhamad Deni Saputra, S.Kom.



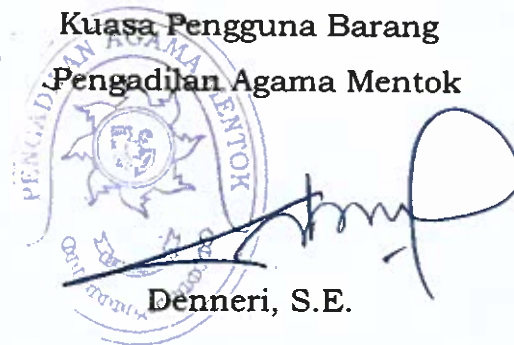
3. Annisa Minda Septira, S.T.



Mengetahui

Kuasa Pengguna Barang

Pengadilan Agama Mentok



Denneri, S.E.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA MENTOK**

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Belo Laut, Mentok,
Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung. 33351. www.pa-mentok.go.id, pa.mentok@gmail.com

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
REVISI ANGGARAN PADA PENGADILAN AGAMA MENTOK PER 30 JUNI TAHUN 2026**

SATKER 682249

No	Revisi	DS	Tanggal Sah	Pagu Awal	Pagu Setelah	Ket
1	DIPA AWAL	7000 3009 0126 4372	24 November 2025	3.923.165.000	3.923.165.000	DIPA Awal
2	1	8950-2782-1552-7827	24 Desember 2025	3,923,165,000	3,864,732,000	Revisi Pusat
3	2	8950-2782-1552-7827	05 Januari 2026	3,864,732,000	3,864,732,000	Revisi KPA
4	3	8950-2782-1552-7827	20 Januari 2026	3,864,732,000	3,864,732,000	Revisi Pergeseran Pagu
5	4	8950-2782-1552-7827	06 Februari 2026	3,864,732,000	3,864,732,000	Revisi POK dan Hal III DIPA
6	5	1010-9589-8602-5900	9-Apr-26	3,864,732,000	6,848,383,000	Revisi Pusat Penambahan Pagu
7	6	1010-9589-8602-5900	27-Apr-26	6,848,383,000	6,848,383,000	Revisi POK dan Hal III DIPA
8	7	9615-5110-4682-4882	17 Juni 2026	6,848,383,000	6,968,166,000	Revisi Pusat
9	8	9615-5110-4682-4882	13 Juli 2026	6,968,166,000	6,968,166,000	Revisi Hal III DIPA

SATKER 690129

No	Revisi	DS DPA	Tanggal Sah Revisi	Pagu Awal	Pagu setelah Revisi	Ket
1.	DIPA AWAL	DS:0140-1304-2322-0406	24-Nov-25	114,990,000	114,990,000	DIPA Awal
2.	Rev 1	DS:0140-1304-2322-0406	5-Feb-26	114,990,000	114,990,000	Revisi POK
3.	Rev 2	DS:0782-2280-4280-7897	15-Apr-26	114,990,000	114,990,000	Revisi Hal III DIPA
4.	Rev 3	DS:8311-5266-5842-6431	29-Apr-26	114,990,000	114,990,000	Revisi POK

Mentok, 20 Juli 2026

Sekretaris Pengadilan Agama Mentok





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

D	Kode Sektir	Nama Sektir	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	015	6	WA	6986	EBA	962	Layanan Umum	1.440.000	1.440.000	N	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	1	100	100
2	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	015	6	WA	6986	EBA	994	Layanan Perkantoran	6.929.428.000	4.077.222.767	N	2	Layanan	0	58.84	terkonfirmasi	00 - 00	1	2	Maximize	Stabilized	0	49.98	100
3	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	015	6	WA	1071	EBB	951	Layanan Sarana Internal	37.000.000	37.000.000	N	7	Unit	7	100	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Time Efficiency	7	100	100
4	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	015	6	WA	6986	EBD	Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	N	1	Dokumen	1	100	terkonfirmasi	00 - 00	2	1	Maximize	Stabilized	1	100	100
Jumlah Nilai																								400	
Jumlah Output																								4	

DAFTAR ASET HASIL PEROLEHAN HIBAH TAHUN 2026

BA : 006 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATKER : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK

NO	SATUAN KERJA	NAMA SATKER	BENTUK HIBAH	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BARANG	KET

Mentok, 20 Juli 2026
 Kuasa Pengguna Barang



DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 JUNI 2026

KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-BS1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	005	01	-	-	-	-	-	-

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris

 DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001

DATA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DIPA 01
PENGADILAN AGAMA MENTOK

IO	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	SALDO PER 30 JUNI 2026
1	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	005	01	VA	653246822491000	BPg 015 Pengadilan Agama Mentok-01	BRI KCP.Muntok	Rp -

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris



DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001

RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 JUNI 2026

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK

NO	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026				Keterangan	
					TUNAI	Saldo Bank				Total
						Saldo	Bank dan No Rek			
1	3000	BANGKA BELITUNG	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	Rp	-	-	-	Rp	-
JUMLAH					-	-	-	-	-	-

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris

DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001


KARTU RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
PER 30 JUNI 2026

K/L : (005) Mahkamah Agung RI
3ASE1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Nilayah : (3000) Bangka Belitung
Satker : (682249) Pengadilan Agama Mentok

No	Uraian Belanja	Nilai Bukti Penerimaan Negara (BPN)	Lama Angsuran (Bulan)	Angsuran Per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Angsuran sampai dengan 30 Juni 2026 (bulan)	Total Angsuran s.d 30 Juni 2026	Sisa Anggaran (Bulan)	Belanja Dibayar Dimuka
	TOTAL	0		0				0		0.00

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris

DENNER, S.E.

NIP. 197703172011011001

KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DIMUKA
PER 30 JUNI 2026

K/L : (005) Mahkamah Agung RI
3ASE1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (3000) Bangka Belitung
Satker : (682249) Pengadilan Agama Mentok

No	Uraian Belanja	Nilai Bukti Penerimaan Negara (BPN)	Lama Angsuran (Bulan)	Angsuran Per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Angsuran sampai dengan 30 Juni 2026 (bulan)	Total Angsuran s.d 30 Juni 2026	Sisa Anggaran (Bulan)	Belanja Dibayar Dimuka
	TOTAL	0		0				0		0.00

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris

Mentok, 20 Juli 2026

Sekretaris



DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001



[illegible]

NIP.197703172011011001

MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DAFTAR SATUAN KERJA YANG TERDAPAT KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Presentasi Pengerjaan (%)	Sub Nilai KDP	Total Nilai KDP	Keterangan		
									Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK									

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris
DENNERI S.E
NIP. 197703172011011001

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MENTOK TAHUN 2026

1. : 006 MAHKAMAH AGUNG RI
2. : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TAHUN ANGGARAN	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	3000	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	2026					

Mentok, 20 Juli 2026
Sesungguhnya

DENNER, S.E.
NIP. 197703172011011001



**RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 Juni 2026**

3A : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
SEKELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATKER : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026					Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank			Total	
						Saldo	Bank dan No Rek			
1	3000	BANGKA BELITUNG	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	Rp	-	Rp	-	Rp	-
JUMLAH					-	-	-	-	-	-

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris



DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001

**RENCANA TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MENTOK TAHUN 2026**

IA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
SELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
		I	II	III		

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris


DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001

SATKER : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK
KABUPATEN BANGKA BELITUNG

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
													Dilanjutka n	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen

Mentok, 20 Juli 2026
Sekretaris


DENNERI, S.E.
NIP. 197703172011011001

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 Juni 2026

ELON I : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
LAYAH : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
TUAN KERJA : 3000 BANGKA BELITUNG
: 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2026				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	682249	Pengadilan Agama Mentok	Rp 24.000.000	Rp	BPG 015 Pengadilan Agama Mentok-01	Rp 532.510	Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. 24.000.000
								Rp 23.467.490	Kuitansi UP
								Rp	Selisih karena Kesulitan Mencari pecahan
								Rp 24.000.000	Jumlah UP
Jumlah									



**RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 Juni 2026**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
 SATKER : 682249 PENGADILAN AGAMA MENTOK

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2026					Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank			Total	
						Saldo	Bank dan No Rek			
							Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	682249	PENGADILAN AGAMA MENTOK	Rp	-	-	-	Rp	
JUMLAH					-	-	-	-	-	

Mentok, 20 Juli 2026
 Sekretaris

